

**PERANCANGAN BLOK F DI PUSAT PEMERINTAHAN BARU  
KABUPATEN AGAM TUO  
(DENGAN PEDEKATAN *HUMAN BEHAVIOR* )**

**Wanda Maharani<sup>1</sup>**

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,  
Universitas Bung Hatta.  
[wanda13ab@gmail.com](mailto:wanda13ab@gmail.com)

**Elfida Agus<sup>2</sup>**

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,  
Universitas Bung Hatta.  
[elfida.agus@bunghatta.ac.id](mailto:elfida.agus@bunghatta.ac.id)

**Jonny Wongso<sup>3</sup>**

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,  
Universitas Bung Hatta.  
[jonnywongso@bunghatta.ac.id](mailto:jonnywongso@bunghatta.ac.id)

**ABSTRAK**

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Kabupaten Agam direncanakan dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan nama Kabupaten Agam Tuo, yang membutuhkan pembangunan pusat pemerintahan baru. Penelitian ini berfokus pada perancangan Blok F sebagai bagian dari pusat pemerintahan tersebut dengan pendekatan Human Behavior, yaitu perancangan yang memperhatikan perilaku, kebutuhan, serta interaksi pengguna ruang. Metode penelitian dilakukan melalui studi literatur, survei lapangan, pengumpulan data primer dan sekunder, serta analisis kebutuhan ruang berdasarkan standar dan aktivitas pegawai maupun masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain Blok F tidak hanya difungsikan sebagai kantor pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang kerja yang mendukung kolaborasi, kenyamanan, serta efisiensi pelayanan publik. Pendekatan Human Behavior menghasilkan rancangan yang menekankan keterbukaan, fleksibilitas ruang, sirkulasi yang jelas, serta dukungan fasilitas pendukung yang ramah pengguna. Kesimpulannya, penerapan konsep ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah, memperkuat identitas Kabupaten Agam Tuo, serta memberikan lingkungan kerja yang lebih produktif dan manusiawi.

**Kata kunci:** Pemekaran wilayah, Pusat Pemerintahan, Human Behavior, Perancangan Arsitektur.

**ABSTRACT**

*Regional expansion is one form of regional autonomy that aims to improve development equity and public services. Agam Regency is planned to be expanded into a New Autonomous Region (DOB) called Agam Tuo Regency, which requires the construction of a new government center. This research focuses on the design of Block F as part of the government center using a Human Behavior approach, which is a design that considers user behavior,*

*needs, and spatial interactions. The research methodology was conducted through literature studies, field surveys, primary and secondary data collection, as well as spatial needs analysis based on standards and activities of both employees and the community. The research results show that the design of Block F is not only functioning as a government office, but also as a workspace that supports collaboration, comfort, and public service efficiency. The Human Behavior approach produces a design that emphasizes openness, spatial flexibility, clear circulation, and user-friendly supporting facilities. In conclusion, the implementation of this concept is expected to improve the quality of regional government services, strengthen the identity of Agam Tuo Regency, and provide a more productive and humane work environment.*

**Keywords:** *Regional expansion, Government center, Human Behavior, Architectural design.*

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah telah resmi diberlakukan di seluruh wilayah di Indonesia dari tahun 2001. Pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan langkah strategis dalam struktur pemerintahan negara Indonesia, yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri, kecuali untuk urusan yang masih menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, meskipun otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah untuk berkembang, masih terdapat tantangan yang dihadapi, seperti ketidakmerataan pembangunan antar daerah, terutama antar daerah perkotaan dan perdesaan. Pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini. (Sari et al., 2023)

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah yang diharapkan dapat memaksimalkan pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah. Pemekaran daerah dianggap mampu mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasca reformasi, kebijakan pemekaran wilayah semakin didominasi oleh proses politik dibanding proses teknokratis, yang berkaitan dengan keinginan daerah untuk memperoleh kekuasaan politik yang sebelumnya yang sebelumnya lebih dikuasai oleh pemerintahan pusat. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, daerah diberikan peluang untuk mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru, sehingga pemekaran daerah pasca reformasi didorong oleh kombinasi kebijakan desentralisasi, kepentingan politik lokal, dan upaya untuk mengejar pemerataan bangunan serta kesejahteraan masyarakat.(Andik et al., n.d.). Beberapa faktor yang mendorong pemekaran wilayah antara lain sikap nasionalisme masyarakat, keberagaman etnis, dan ketidakadilan dalam pembagian hasil kekayaan negara. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk membentuk daerah otonom baru yang lebih fokus dalam mengelola potensi lokal.

Provinsi Sumatera Barat memiliki sejarah panjang terkait pemekaran daerah, yang dimulai sejak era kolonial Belanda dengan upaya memisahkan Minangkabau menjadi Minang Tuo dan Minang Mudo. Pasca-kemerdekaan, antara tahun 1945-1958, terjadi pemekaran beberapa

daerah, termasuk Kabupaten Pasisir Selatan yang terpisah dari Kabupaten Padang Pariaman. Pada masa orde baru, dibentuk Kota Madya Padang Panjang (1973) dan Kota Madya Bukittinggi (1983) dari Kabupaten Agam, serta pemekaran Kota Bukittinggi melalui Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1999. Setelah reformasi 1998, tuntutan pemekaran meningkat, menghasilkan Kabupaten Dharmasraya (2003) dan Kabupaten Solok Selatan (2007), meskipun demikian, proses pemekaran tidak selalu mulus, menghadapi tantangan administratif, teknis, dan dinamika politik lokal. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan aspek legatilat, kelayakan, dan kepentingan masyarakat dalam proses pemekaran yang terus berlangsung.(Unand, n.d.)

Sejak tahun 1990 banyak sekali aspirasi masyarakat kabupaten Agam mengenai pemekaran kabupaten Agam, aspirasi itu sudah dilakukan oleh masyarakat yang ada di beberapa kecamatan termasuk kecamatan IV koto, kecamatan malalak, kecamatan baso, kecamatan sungai pua, kecamatan candung dan beberapa kecamatan lainnya. Selain itu, jauhnya akses menuju ke pusat pemerintahan kabupaten agam yang ada di lubuk basung menjadi keluhan bagi masyarakat sehingga banyak aspirasi muncul mengenai pemekaran kabupaten agam ini. Kabupaten Agam merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang memiliki potensi untuk dijadikan Daerah Otonomi Baru (DOB). Kabupaten Agam berada di Geografis wiliyah yang cukup luas, sehingga masyarakat Agam yang berada di bagian ujung Kabupaten Agam, mengurus segala kebutuhan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan ke daerah Lubuk Basung. (DPDR Smbar, 2024)

Pembentukan DOB yang akan dinamakan Kabupaten Agam Tuo. Semua persyaratan yang diperlukan telah diajukan oleh Bupati Kabupaten Agam, dan saat ini tinggal menunggu tanggapan dari Pemerintah Provinsi serta Gubernur Sumatera Barat. Jika pemekaran ini terwujud, ibukota kabupaten baru akan berlokasi di Kecamatan IV Koto, yang akan memerlukan pembangunan pusat pemerintahan baru, termasuk rencana pembangunan Kantor Bupati untuk DOB Agam Tuo.

Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan DOB Agam Tuo. Diharapkan, dengan adanya kabupaten baru ini, pelayanan kepada masyarakat yang tertinggal di Kabupaten Agam dapat ditingkatkan secara signifikan. Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat, Sawal, menyatakan dalam pertemuan dengan Bupati Agam, Andi Warman, pada Jumat (4/5/2024), bahwa rencana pembentukan DOB Agam Tuo telah lama diusulkan namun belum ditindaklanjuti. Kini, di bawah kepemimpinan Bupati Andi Warman, rencana tersebut kembali diangkat dan diharapkan dapat segera direalisasikan. Untuk mempercepat proses pemekaran Agam Tuo, Ketua DPRD Kabupaten Agam, Dr. Novi Irwan, S.Pd, M.M, bersama Komisi I DPRD Agam, melakukan kunjungan kerja untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Gubernur Sumatera Barat pada Kamis (18/7). Pertemuan yang berlangsung di Istana Gubernur Sumbar ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Agam, Aderia, SP, MM, Wakil Ketua Komisi I Ridwan Suhaili, M.Ed, Sekretaris Komisi M. Ater Dt. Manambun, serta anggota dan sekretariat DPRD Agam. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Agam menyampaikan terima kasih atas sambutan positif Gubernur terhadap pemekaran Agam Tuo, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, mempercepat pembangunan, dan memajukan masyarakat.

Dipandang dari sisi pemerintahan dengan wilayah yang lebih kecil, pemekaran wilayah dapat memberikan dan meningkatkan pengelolaan dan pengawasan dalam pembentukan sistem pemerintah, yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan terbentuknya Kabupaten Agam Tuo, diharapkan dapat memberikan akses terhadap pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan layanan publik dapat ditingkatkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang merata. (Diskominfo, 2024). Dengan terbentuknya ibukota Kabupaten Agam Tuo di kecamatan IV Kota, maka dibutuhkannya pusat pemerintahan yang akan mengelola dan menunjang pelayanan bagi masyarakat di pusat pemerintahan daerah otonomi baru.

Perencanaan Blok F di Pusat Pemerintahan Baru Kabupaten Agam Tuo dengan pendekatan Human Behavior. Kabupaten Agam, yang memiliki luas wilayah 2.264,89 km<sup>2</sup> dengan populasi 532.180 jiwa, telah lama menghadapi aspirasi masyarakat untuk pemekaran wilayah sejak tahun 1990-an. Pemekaran ini diperlukan karena jarak yang jauh antara masyarakat dengan pusat pemerintahan di Lubuk Basung, yang menyulitkan akses pelayanan administrasi. Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Agam Tuo akan mencakup 10 kecamatan dengan total populasi 285.609 jiwa, termasuk Kecamatan IV Koto yang akan menjadi ibukota baru. Wilayah ini memiliki infrastruktur pendidikan yang memadai dengan 191 TK/RA, 224 SD/MI, 68 SMP/MTs, dan 43 SMA/MA, serta didukung oleh 9 puskesmas sebagai fasilitas kesehatan utama.

Blok F dalam masterplan pusat pemerintahan dirancang untuk menampung tiga instansi penting: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Pemilihan ketiga dinas ini didasarkan pada struktur organisasi yang komprehensif dan kebutuhan pelayanan publik yang tinggi bagi masyarakat Kabupaten Agam Tuo. Lingkungan kerja yang dirancang dengan pendekatan human behavior dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat stres, dan mendukung kolaborasi serta fleksibilitas kerja. Hal ini menjadi relevan mengingat karyawan modern lebih menghargai ruang yang mendukung interaksi sosial, kesejahteraan mental, dan efisiensi pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan Blok F dalam Master Plan Pusat Pemerintahan Kabupaten Agam Tuo yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan menerapkan pendekatan Human Behavior. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan desain yang menekankan keterbukaan, fleksibilitas ruang, sirkulasi yang jelas, serta fasilitas pendukung yang ramah pengguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah dan memberikan lingkungan kerja yang lebih produktif dan manusiawi. Pendekatan Human Behavior yang diterapkan dalam penelitian ini menekankan desain yang memperhatikan perilaku pengguna, kebutuhan spatial, dan interaksi sosial. Konsep ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya berfungsi sebagai kantor pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi yang mendukung kesejahteraan mental dan produktivitas pegawai. Elemen-elemen seperti keterbukaan ruang, fleksibilitas, sirkulasi yang jelas, dan fasilitas pendukung yang ramah pengguna menjadi fokus utama perancangan.

Pembentukan pusat pemerintahan baru Kabupaten Agam Tuo membutuhkan perencanaan yang komprehensif, khususnya dalam merancang fasilitas perkantoran yang dapat mengakomodasi kebutuhan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam konteks desain

perkantoran modern, terdapat paradigma baru yang menekankan pentingnya mempertimbangkan perilaku manusia (human behavior) dalam perancangan ruang kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pegawai. Inovasi dalam penelitian ini terletak pada integrasi konsep overlapping spaces yang menciptakan area pelayanan terpadu dengan tetap mempertahankan hierarki struktural pemerintahan. Penerapan teknologi smart office, elemen civic design, dan nilai budaya lokal diharapkan dapat menghasilkan kantor dinas yang fungsional, efisien, humanis, dan inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan pusat pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Agam Tuo.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menganalisis perencanaan Blok F di Pusat Pemerintahan Baru Kabupaten Agam Tuo dengan konsep Human Behavior. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur untuk memperoleh landasan teori tentang perilaku pengguna ruang kantor, survei lapangan langsung di lokasi Nagari Balingka Kecamatan IV Koto untuk menganalisis kondisi eksisting tapak, wawancara dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam serta stakeholder terkait untuk memperoleh data kebutuhan ruang dan aktivitas pegawai, serta pengumpulan data primer berupa dokumentasi kondisi fisik tapak dan data sekunder berupa peraturan pemerintahan, standar ruang kantor, dan dokumen perencanaan kawasan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan konsep perencanaan yang mempertimbangkan aspek perilaku pengguna, kebutuhan fungsional ketiga dinas (Pendidikan dan Kebudayaan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pariwisata Pemuda dan Olahraga), dan integrasi dengan masterplan kawasan pusat pemerintahan.

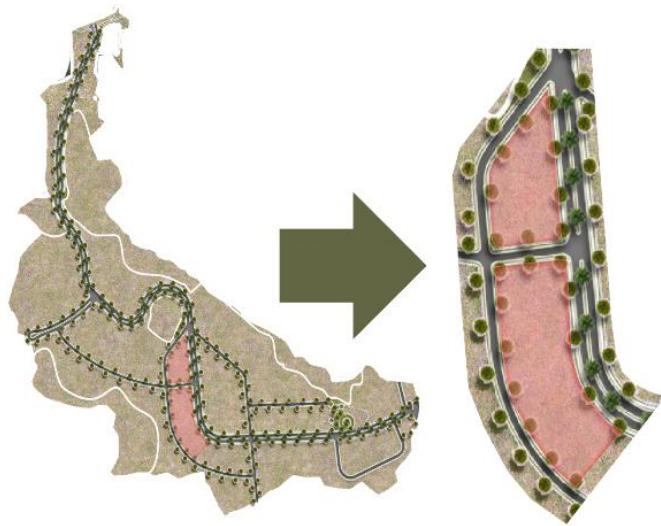
Berdasarkan metode yang digunakan diatas, berikut adalah lokasi Blok F di Pusat Pemerintahan Baru Kabupaten Agam Tuo.

### **Lokasi**

Pusat pemerintahan Kabupaten Agam Tuo ditetapkan berada di Kecamatan IV Koto, tepatnya di kawasan Jl. Lintas Sicinci, Malalak, Balingka, dengan luas Kawasan 10.100 m<sup>2</sup>.

### **Batas Site**

Utara	: Jalan Sekunder
Selatan	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Barat	: Jalan Sekunder.
Timur	: Jalan Primer



**Gambar 1. Lokasi Site**  
(sumber : Penulis, 2025)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

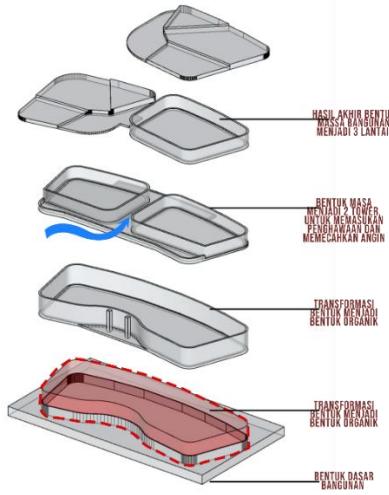
### **Pelaku dan Fungsi**

Blok F dalam Pusat Pemerintahan Baru Kabupaten Agam Tuo akan menampung tiga instansi pemerintahan utama yang melayani kebutuhan masyarakat dengan karakteristik pelaku dan fungsi yang berbeda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berfungsi sebagai pusat pengelolaan sistem pendidikan dari PAUD hingga SMP serta pelestarian budaya daerah, dengan pelaku utama berupa kepala dinas, sekretariat, lima bidang spesialisasi, dan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam administrasi kependudukan dan pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan, dengan struktur organisasi yang terdiri dari kepala dinas, sekretariat, dan tiga bidang pelayanan yang melayani seluruh lapisan masyarakat untuk kebutuhan dokumen resmi. Sementara itu, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi pengembangan destinasi wisata, pembinaan generasi muda, dan pengelolaan kegiatan olahraga, dengan pelaku yang meliputi kepala dinas, sekretariat, lima bidang khusus, serta masyarakat umum, komunitas pemuda, dan pelaku industri pariwisata yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan program.

### **Konsep Bentuk**

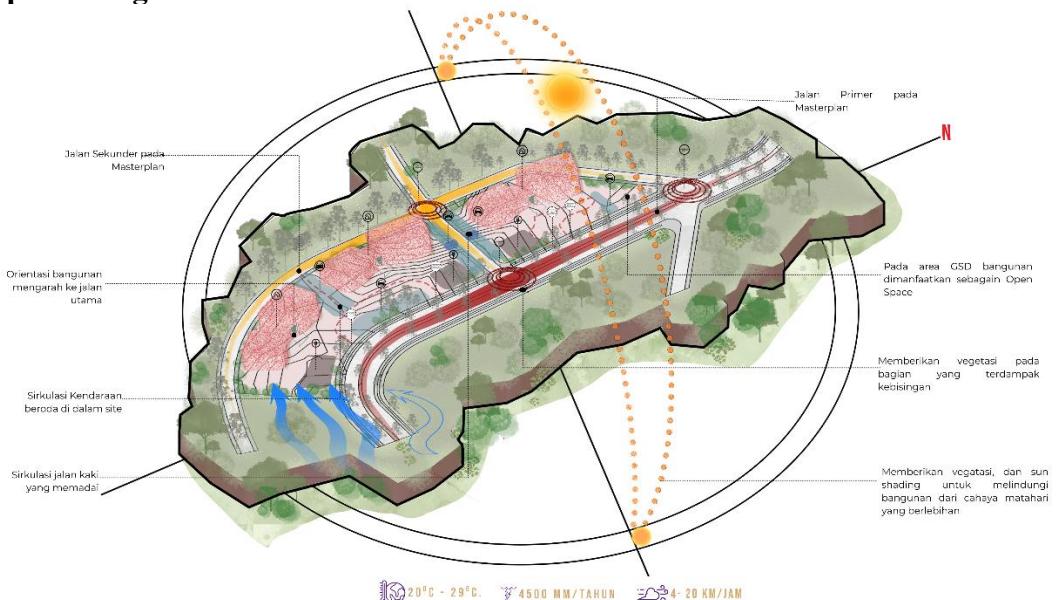
Proses perancangan dimulai dari bentuk dasar bangunan yang kemudian mengalami transformasi bertahap melalui beberapa tahapan pengembangan desain. Tahap awal menunjukkan bentuk dasar bangunan sebagai fondasi konseptual, dilanjutkan dengan penerapan bentuk organik yang mengikuti kontur dan karakteristik alami tapak untuk menciptakan integrasi harmonis dengan lingkungan sekitar. Proses selanjutnya melibatkan transformasi bentuk organik menjadi bentuk prismatic yang lebih terstruktur dan fungsional, memungkinkan pembagian ruang yang efisien sesuai kebutuhan program bangunan. Tahap keempat menunjukkan hasil akhir bentuk dengan melalui 3 lantai yang mengoptimalkan pemanfaatan lahan vertikal, dimana setiap massa bangunan dirancang untuk menampung fungsi-fungsi spesifik dari kebutuhan ruang yang berbeda. Konsep ini mencerminkan

pendekatan desain yang responsif terhadap kondisi tapak sambil tetap mempertahankan efisiensi fungsional dan estetika arsitektural yang sesuai dengan karakter bangunan pemerintahan modern.



**Gambar 2. Konsep bentuk**  
(sumber : Penulis, 2025)

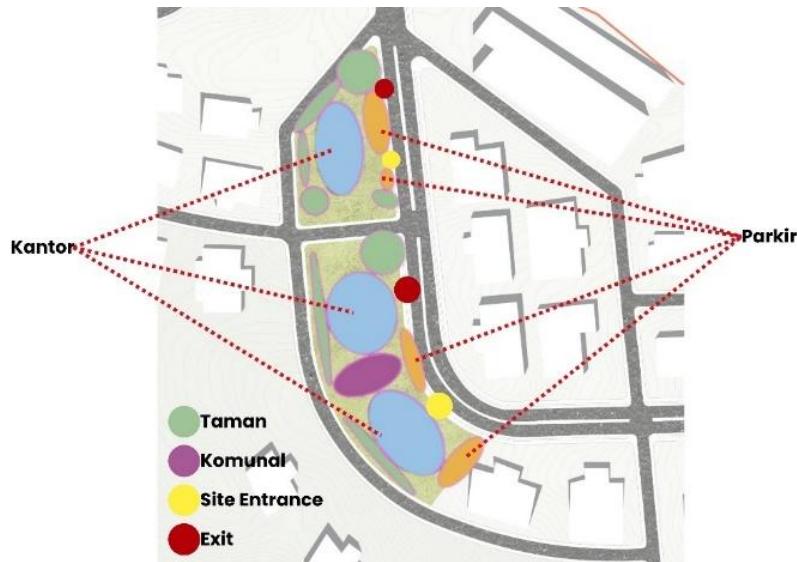
### Konsep Zonning



**Gambar 3. Superimpose**  
(sumber : Penulis, 2025)

Berdasarkan diagram superimpose dengan hasil dari Analisa site yang ditampilkan, pembagian zonasi tapak Blok F diorganisir secara strategis dengan mempertimbangkan sirkulasi, fungsi, dan hierarki pelayanan publik. Zona bagian bawah (selatan) berfungsi sebagai area entrance utama yang ditandai dengan site entrance berwarna kuning, dilengkapi dengan area parkir di sisi barat dan timur yang terhubung langsung dengan jalan akses primer, menciptakan kemudahan bagi pengunjung dan pegawai untuk mengakses kompleks perkantoran. Zona tengah merupakan core area yang menampung tiga massa bangunan kantor

yang diindikasikan dengan area biru, dikelilingi oleh ruang terbuka hijau (taman) yang berfungsi sebagai buffer sekaligus area rekreasi pasif bagi pengguna bangunan, dengan penataan yang memungkinkan sirkulasi internal yang efisien antar massa bangunan. Zona bagian atas (utara) diposisikan sebagai area komunal yang ditandai dengan warna ungu, berfungsi sebagai ruang berkumpul dan interaksi sosial yang mendukung konsep human behavior, sementara titik-titik exit berwarna merah ditempatkan strategis di berbagai sisi tapak untuk memenuhi standar keselamatan dan memberikan fleksibilitas sirkulasi darurat, dengan keseluruhan zonasi yang menciptakan hierarki ruang dari publik ke semi-publik hingga privat sesuai dengan karakter pelayanan pemerintahan.



**Gambar 4. Konsep Zonning**  
(sumber : Penulis, 2025)

### Implementasi Blok Plan

Hasil implementasi analisa desain menghasilkan blok plan yang menerapkan sistem atap pelana dengan kemiringan 15 derajat sebagai respons terhadap kondisi iklim tropis dan kebutuhan fungsional bangunan. Pemilihan bentuk atap pelana dengan sudut kemiringan yang relatif landai ini bertujuan untuk mengoptimalkan drainase air hujan sekaligus mengurangi beban angin pada struktur bangunan. Penataan massa bangunan dalam blok plan mengikuti pola radial yang menyesuaikan bentuk tapak, dengan setiap blok bangunan menerapkan orientasi atap yang konsisten untuk menciptakan keseragaman visual dan efisiensi struktural. Implementasi desain ini juga mempertimbangkan aspek maintenance dan durabilitas, dimana kemiringan 15 derajat memungkinkan sistem drainase yang efektif tanpa memerlukan konstruksi yang terlalu kompleks. Hasil blok plan menunjukkan integrasi yang baik antara pertimbangan teknis, estetika, dan keberfungsian dalam satu kesatuan perencanaan yang sistematis.



**Gambar 5. Blok Plan**  
(sumber : Penulis, 2025)

### Site Plan

Implementasi desain menghasilkan site plan yang mengoptimalkan pemanfaatan lahan dengan pendekatan zoning yang terintegrasi. Konsep penataan massa bangunan yang memisahkan antar dinas yang berbeda, dengan mempertimbangkan orientasi bangunan terhadap arah mata angin dan aksesibilitas. Implementasi jalur sirkulasi dirancang hierarkis dengan jalan utama sebagai spine yang menghubungkan seluruh dinas, dilengkapi dengan jalur pedestrian dan area parkir yang tersebar merata. Penerapan konsep ruang terbuka hijau sebesar 30% dari total luas tapak tidak hanya memenuhi regulasi setback. Hasil site plan menunjukkan keseimbangan optimal antara kepadatan bangunan dengan kualitas ruang luar.



**Gambar 6. Site Plan**  
(sumber : Penulis, 2025)

### Tampak

Implementasi analisis desain menghasilkan tampak bangunan yang mencerminkan identitas institusi pendidikan dan kebudayaan melalui pendekatan *Human Behavior* dengan sentuhan

lokal. Konsep fasad mengadopsi sistem modular dengan material kayu sebagai elemen dominan yang memberikan kehangatan visual dan responsivitas terhadap iklim tropis, dikombinasikan dengan bukaan jendela yang teratur untuk optimalisasi pencahayaan dan penghawaan alami. Penerapan prinsip desain sustainable terlihat dari penggunaan secondary skin yang berfungsi sebagai solar shading, mengurangi heat gain sekaligus menciptakan permainan cahaya-bayangan yang dinamis pada interior. Komposisi massa bangunan dirancang bertingkat dengan variasi ketinggian untuk menciptakan skyline yang tidak monoton, sementara penggunaan material alami dan warna earth tone memperkuat karakter bangunan sebagai institusi yang ramah lingkungan dan berakar pada nilai-nilai lokal. Hasil tampak menunjukkan keseimbangan antara fungsionalitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan dalam satu kesatuan desain yang kohesif.



**Gambar 7. Tampak**  
(sumber : Penulis, 2025)

### **Ekterior**

Hasil implementasi pendekatan human behavior dalam perancangan eksterior kantor dinas menghasilkan desain yang mengutamakan kenyamanan dan interaksi sosial pengguna. Konsep desain eksterior menerapkan prinsip biophilic dengan mengintegrasikan ruang terbuka hijau, taman atap, dan lanskap yang kaya vegetasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyehatkan secara psikologis. Penataan area luar ruangan dirancang dengan zona-zona aktivitas yang mendukung interaksi sosial, seperti area berkumpul outdoor dan jalur pedestrian yang nyaman, sesuai dengan kebutuhan perilaku manusia akan ruang sosialisasi. Pemilihan material fasad dengan kombinasi kayu dan elemen modern menciptakan kesan hangat dan ramah, yang secara psikologis dapat mengurangi stres pengunjung dan pegawai. Desain lanskap dengan variasi tanaman dan area duduk outdoor memberikan alternatif ruang kerja dan istirahat yang mendukung produktivitas serta kesejahteraan pengguna, mencerminkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan manusia akan koneksi dengan alam dalam lingkungan kerja.



**Gambar 8. Eskterior**  
(sumber : Penulis, 2025)

### Interior

Implementasi pendekatan human behavior dalam perancangan interior kantor Dinas menghasilkan ruang kerja yang mengutamakan kenyamanan psikologis dan produktivitas pengguna. Konsep desain menerapkan elemen hijau berupa indoor garden dan living wall yang terbukti dapat mengurangi stress dan meningkatkan konsentrasi pegawai. Penerapan dalam penataan zona kerja yang mempertimbangkan kebutuhan privasi dan interaksi sosial, dengan area meeting informal yang dilengkapi seating yang fleksibel untuk mendorong kolaborasi spontan. Pemilihan pallet warna earth tone dan material alami seperti kayu menciptakan atmosfer yang hangat dan welcoming, sesuai dengan penelitian psikologi lingkungan yang menunjukkan pengaruh positif warna terhadap mood dan performa kerja. Implementasi lighting design yang mengkombinasikan pencahayaan alami dan buatan, menghasilkan lingkungan kerja yang ergonomis dan mendukung well-being karyawan dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.





**Gambar 9. Interior R. Pelayanan, R. Rapat, Kafetaria.**  
(sumber : Penulis, 2025)

## KESIMPULAN

Dalam pemekaran daerah menjadi Daerah Otonomi Baru, perencanaan kantor dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas pariwisata pemuda dan olahraga, serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil perlu dirancang dengan pendekatan perilaku manusia untuk mendukung pelayanan yang optimal. Kantor dinas pendidikan harus memiliki ruang konsultasi yang nyaman untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pendidikan. Di sisi lain, dinas pariwisata memerlukan area informasi yang menarik dan mudah diakses guna mendukung promosi potensi wisata yang ada di daerah tersebut.

Sementara itu, dinas kependudukan dan pencatatan sipil membutuhkan ruang layanan yang efisien agar proses administrasi berjalan lancar tanpa hambatan. Dengan desain ruang yang memperhatikan kebutuhan psikologis dan sosial pengguna, ketiga kantor ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Hal ini akan memungkinkan mereka memberikan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah otonomi baru, sehingga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Altas Maulana. (2024, March 19). *DPRD Kabupaten Agam sepakati DOB Kabupaten Agam Tuo. Antara.*
- Andik, W., Muqoyyidin, U., Pesantren, T., Darul 'ulum, J., Komplek, P. P., Darul, U., & Peterongan, J. (n.d.). *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan.*
- Diskominfo. (2024, August 23). *Agam Tuo Siap Menjadi DOB: Sekda Agam Paparkan Potensi dan Manfaatnya.* Pemkab Agam.
- DPDR SUMBAR. (2024, May 7). *Pengajuan DOB di Agam Bisa Terealisasi Setelah Pilkada.* Pemprov DPRD SUMBAR.
- Sari, W. P., Zuriyani, E., & Suryani, A. I. (2023). Analisis Kesiapan Ranah IndoJati Sebagai Daerah Otonomi Baru. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(4), 829–832.  
<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i4.220>
- Sektoral, S., & Agam, K. (n.d.). *DISKOMINFO STATISTIK SEKTORAL.*
- UIN Suska Riau. (n.d.). *Rencana Pemekaran Wilayah Kab. Agam.*
- Unand. (n.d.).